

**ANALISIS PENGARUH UNSUR-UNSUR *INTERNAL CONTROL SYSTEM*  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)**

**Nurniatul Aini  
Emrinaldi Nur DP  
Julita**

Email : [nurniatulaini@yahoo.com](mailto:nurniatulaini@yahoo.com)

***ABSTRACT***

*This study aimed to examine the effect of variables that are included in the elements of the Internal Control System, such as Competence of government officials, financial accountability Applied, Information Technology Utilization, decision authority and obedience to the laws and regulations to Performance Accountability Government.*

*The population in this study were all SKPDs Pelalawan. The Sample in this study was the head of department, chief / head of section and sub-section of financial in SKPD Pelalawan by the number of respondents 86 people from 43 SKPD. Data collection method using a questionnaire. Data were analyzed using analysis methods Partial Least Square (PLS) ver.2.0 with a model inner and outer evaluation models.*

*The results of this research showed : Competence of government officials and Obedience to Laws has a significant positive effect on performance accountability government (AKIP), while the variable application of Information Technology Utilization, financial accountability, and decision authority has no effect on agency performance accountability government (AKIP).*

**Keywords:** *Performance Accountability Government, Competence government officials, financial accountability Applied, Information Technology Utilization, decision authority, obedience to the laws and regulations.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Fenomena perkembangan sektor publik di Indonesia setelah krisis ekonomi tahap I di tahun 1997 telah menimbulkan tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pemerintah telah menerbitkan suatu paket perundangan di bidang keuangan negara sekaligus sebagai landasan hukum bagi reformasi pengelolaan keuangan negara,

yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan. Disamping itu pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Inpres ini menyebutkan bahwa agar terselenggaranya *good governance* di Indonesia diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Salah satu hal yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kompetensi aparatur pemerintah. Menurut A. D. Lucia & R. Lepsinger dalam Oktiantra (2010), Kompetensi merupakan model yang mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja suatu instansi. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian Oktiantra (2010) yang meneliti mengenai kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di kota Dumai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Penerapan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan pernyataan LAN dan BPKP dalam Oktiantra (2007) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, dan pengungkapan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas keuangan tentunya berhubungan dengan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Karena ketika pemerintah melaporkan kinerjanya secara akuntabel, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban kinerjanya yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penelitian mengenai penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dilakukan Oktiantra (2010), hasilnya penerapan akuntabilitas keuangan

memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Suatu teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat kinerja, seperti kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan (Wahana Komputer, 2003 dalam Hara 2010). Wijana (2007) dalam penelitiannya tentang pemanfaatan teknologi informasi menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain Kompetensi aparatur pemerintah, Penerapan akuntabilitas keuangan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Otoritas pengambilan keputusan juga merupakan faktor yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas kinerja (Artley, 2001 dalam Silvia, 2013). Silvia (2013) yang meneliti tentang Otoritas pengambilan Keputusan menyatakan bahwa Otoritas pengambilan Keputusan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal lain yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Ketaatan pada peraturan perundangan. Dengan adanya Ketaatan pada peraturan perundangan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Sedangkan penelitian mengenai ketaatan pada peraturan perundangan dilakukan oleh Oktiantra (2010) dan Hara (2010). Hasil penelitian keduanya menyimpulkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melihat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, Otoritas pengambilan Keputusan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : Apakah secara parsial Kompetensi Aparatur Pemerintah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Otoritas Pengambilan Keputusan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk menguji dan Menganalisis secara parsial pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Otoritas Pengambilan Keputusan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu akuntansi sektor publik. Bagi para pengambil keputusan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya pada instansi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Pelalawan dalam mewujudkan *good governance*.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

### **Kompetensi Aparatur Pemerintah**

Mc.Clelland dalam Oktiandra (2010) mendefinisikan kompetensi (*competency*) sebagai: karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para *outstanding performers* lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, dari pada apa yang dilakukan para *average performers*.

Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk tingkat

kategori baik atau rata-rata (BKN, 2003 dalam Oktindra, 2010). Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Prayitno (BKN:2003), standar kompetensi mencakup tiga hal, yaitu dengan yang disingkat KSA : Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*Skills*), dan Sikap (*attitude*). Menurut Lembaga Administrasi Negara (2004) dalam Oktindra (2010), kompetensi memiliki lima cakupan antara lain : Kemampuan tehknikal, Kemampuan Manajerial, Kemampuan komunikasi, Kemampuan strategik, dan Kemampuan etika.

### **Penerapan Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Rasul (2003) dalam Hara (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Akuntabilitas merupakan konsep yang sangat luas mensyaratkan agar pemerintah memberi laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunanya harus sesuai peruntukan.

Selain itu, pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat mengenai penghimpunan sumber-sumber dana publik dan tujuan penggunaanya.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi infomasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson et al (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan tenologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

TI dapat menyajikan informasi dalam bentuk yang berguna serta dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke lokasi lain. TI mengintegrasikan data dari berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal, dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

### **Otoritas Pengambilan Keputusan**

Menurut Cavalluzzo dan Ittner (2003) dalam Silvia (2013), Otoritas pengambilan keputusan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat

keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi. Pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari pimpinan kepada para bawahannya merupakan elemen penting untuk terciptanya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan adanya pendelegasian otoritas pengambilan keputusan maka dapat membantu manajemen untuk dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, menumbuhkembangkan kreatifitas dan usaha dalam melakukan suatu perubahan. selain itu juga dapat meningkatkan akuntabilitas diantara personil organisasi sektor publik. Setiap bawahan yang diberi otoritas untuk mengambil keputusan dan bawahan tersebut harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dengan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari pimpinan kepada bawahan dalam instansi pemerintah dapat membantu organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Ketaatan Pada Peraturan Perundangan**

Keuangan Negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang-undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan Negara. Pertanggungjawaban keuangan Negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan Negara yang diperoleh dari keuangan rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *Civil Law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk

peraturan perundangan. Implementasi dari Stufen teori dalam sistem hukum di Indonesia, telah diatur dalam ketentuan MPRS Nomor : XX/MPRS/1966; dan saat ini telah diatur sesuai TAP MPR Nomor : III Tahun 2000 dengan susunan hirarki sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- 3) Undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan Daerah

### **Pengembangan Hipotesis**

#### ***Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)***

Kompetensi pegawai juga memungkinkan untuk tercapainya suatu Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang efektif. Sesuai dalam prinsip Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kedua yaitu berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif karena kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Oktiandra (2010) mengemukakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Begitu juga dengan Rozi (2010) yang menyatakan bahwa Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

**H<sub>1</sub> : Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

***Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)***

Salah satu hal yang sangat mungkin mempengaruhi AKIP adalah Akuntabilitas keuangan itu sendiri. Ketika pemerintah melaporkan kinerjanya secara akuntabel, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban kinerjanya yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Karena pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari kegiatan/program yang telah dilaksanakan mengenai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya yang tersedia guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Solihin, 2007 dalam Hara, 2010).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Soleman (2007) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selain itu, Oktiantra (2010) juga menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

**H<sub>2</sub> : Penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)***

Hampir setiap perkantoran telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data

administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public services*), pengolahan dan dokumentasi data, perencanaan data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Begitu juga di pemerintahan, diharapkan akuntan di setiap SKPD dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi tersebut. Sehingga dapat menjadi lebih profesional guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Wijana (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja.

**H<sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

***Pengaruh Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)***

Semakin baik otoritas pengambilan keputusan maka akan mengakibatkan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan juga semakin baik (Silvia, 2013). Terpusatnya otoritas pengambilan keputusan juga akan mengurangi tingkat akuntabilitas diantara personil organisasi sektor publik dan akan menyebabkan timbulnya keputusan tentang kinerja dan sumber daya yang tidak diinginkan dan mengarah pada penurunan kualitas pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2013) menunjukkan hasil bahwa Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

**H<sub>4</sub> : Otoritas Pengambilan Keputusan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

## ***Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)***

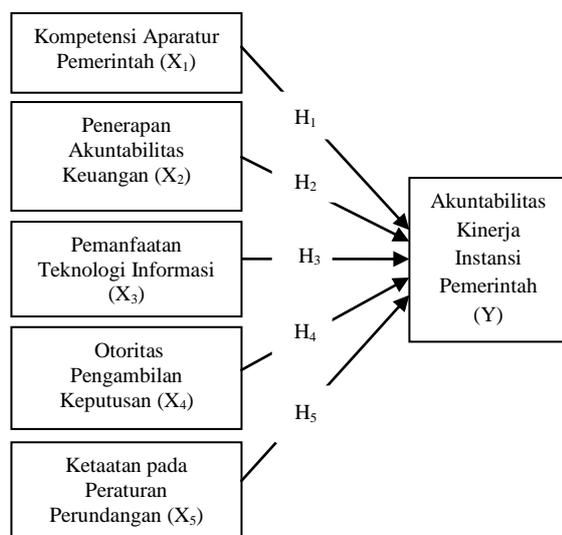
Solihin (2007) mengemukakan untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan *reward system* dan *punishment* secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi AKIP.

Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Oktiandra (2010) dan Hara (2010) yang menemukan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**H<sub>5</sub> : Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

### **Model Penelitian**

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat digambarkan model penelitian di bawah ini:



**Gambar 1. Model Penelitian**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel *nonprobabilitas* dengan *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Pelalawan yang berjumlah 43 unit. Responden adalah kepala satuan kerja, dan kasubag keuangan dengan jumlah responden 86 orang dari 43 unit SKPD. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data subyek.

Pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Dengan skala penilaian (skor) 1 sampai dengan 5, dimana masing-masing variabel diberi daftar pertanyaan yang akan dibagikan kepada responden. Kemudian masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban ekstrim negatif dan nilai 5 untuk ekstrim positif.

Data di analisa dengan menggunakan metode Analisis Data Multivariate. Teknik analisis yang dipakai adalah *Struktural Equation Modelling* dengan metode alternatif menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS pada dasarnya didefinisikan oleh dua set persamaan, *inner model* yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*) dan *outer model* yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator atau variabel manives-nya (*measurement model*).

Terdapat dua konsep untuk menguji kualitas data, yaitu validitas dan reliabilitas. Dalam *Partial Least Square* (PLS), uji kualitas data disebut dengan Evaluasi model pengukuran (*Measurement Model*) atau *Outer Model*. Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu instrument mengukur konsep yang seharusnya diukur. Uji validitas akan

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Smart PLS Versi 2.0 melalui model pengukuran *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memperoleh hasil yang konsisten, stabil dan relative tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. *Composite reliability* merupakan model pengukuran untuk menguji reliabilitas instrument dengan menggunakan PLS.

Pengujian hipotesis dalam PLS disebut dengan model structural (*structural model*) atau *inner model*. *Structural model* dievaluasi dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji *goodness of fit model*. Uji yang kedua adalah melihat signifikansi pengaruh antar variable atau konstruk. Signifikansi pengaruh antar variable dilihat dari nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistic. Nilai koefisien parameter akan menunjukkan terdapat pengaruh negative atau positif dalam hubungan antar variable. Kemudian untuk signifikansinya dapat diketahui dengan membandingkan nilai t statistic dengan t table. Jika nilai t statistik kurang dari 1.96 (t table) maka hipotesis ditolak atau dengan kata lain menerima Hipotesis nol ( $H_0$ ) atau tidak memiliki pengaruh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Sei Kijang, dan Kecamatan Bandar Petalangan.

### Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 86 eksemplar, dimana pada masing-masing SKPD disebar sebanyak 2 eksemplar, yang terdiri dari Kepala SKPD, dan Kasubag/kabid Keuangan. Jumlah pengembalian kuesioner oleh responden sebanyak 72 kuesioner (83.72%), sedangkan kuesioner yang tidak kembali berjumlah 14 eksemplar (16.28%). Dari sampel yang diperoleh, Responden yang menduduki posisi kepala SKPD maupun kasubag/kabid keuangan memiliki tingkat pendidikan yang baik, yaitu 11.11% atau 8 orang dari total responden berlatar belakang Diploma (Akademi), 41.67% (30 orang) berlatar belakang S-1, bahkan 34 orang (47.22%) sudah menyelesaikan pendidikan hingga S-2.

Jumlah responden yang berjenis kelamin pria adalah 86.11% sedangkan wanita sebesar 13.89%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa posisi pejabat didominasi oleh pria. Untuk usia responden berkisar antara usia 31 tahun hingga 40 tahun yaitu sebanyak 27 orang (37.5%) sedangkan sisanya usia kurang dari 30 tahun sebanyak 7 orang (9.72%) dan usia di atas 40 tahun sebanyak 38 orang (52.78%).

### Analisis Data Menggunakan SmartPLS

#### Hasil Uji Kualitas data (*Outer Model*)

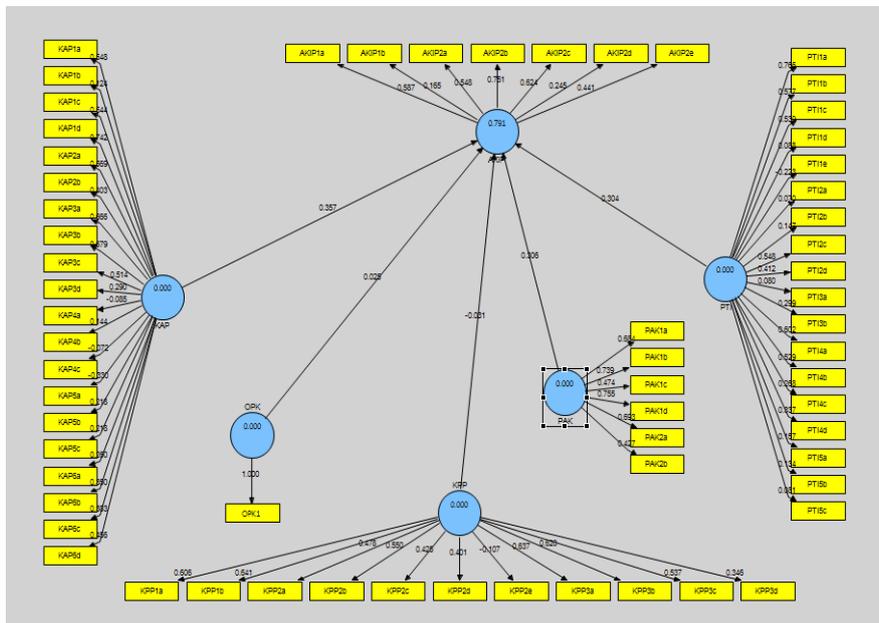
*Outer model* menunjukkan hubungan variable laten dengan indikatornya dan dievaluasi dengan *convergent validity* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk *block* indikatornya.

#### *Convergent Validity*

*Convergent Validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score*. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih

dari 0.5(>0.5) dengan konstruk yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan alat

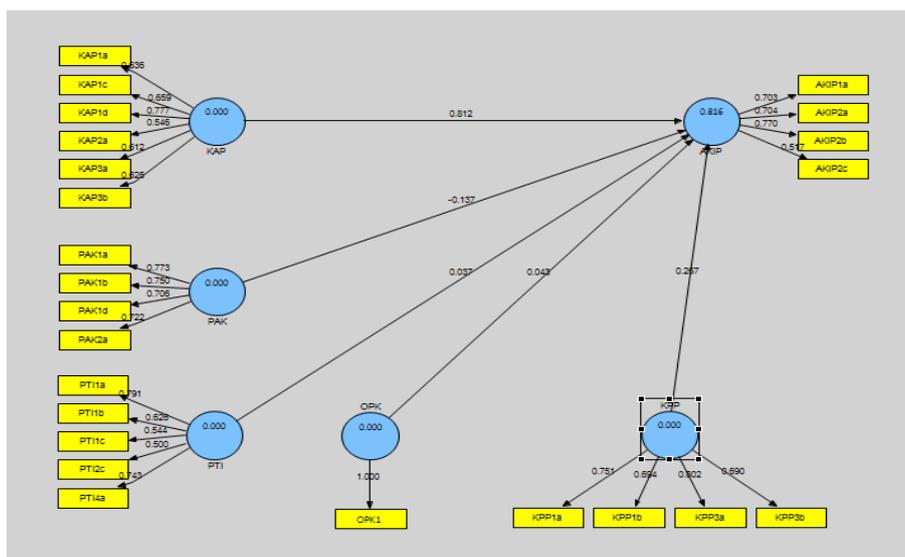
analisis *Partial Least Square/ PLS* dengan hasil sebagai berikut:



**Gambar 2 Full Model Structural (Pra Eliminasi)**  
 Sumber : Output SmartPLS (2014)

Berdasarkan Gambar 1. Nilai *outer model* atau korelasi antara konstruk dengan variabel pada awalnya belum memenuhi *convergent validity* karena masih cukup banyak indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,50. Nilai *Loading factor* yang tidak memenuhi persyaratan mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut tidak

berkorelasi terhadap konstruksya. Berdasarkan pada *outer loading* diatas, maka indikator yang memiliki nilai *Loading factor* di bawah 0,50 dikeluarkan dari model dan tidak signifikan. Selanjutnya model ini di re-estimasi dan hasil output grafik SmartPLS tampak sebagai berikut.



**Gambar 3 Full Model Structural (Pasca Eliminasi)**  
 Sumber : Output SmartPLS (2014)

### Discriminant Validity

Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dari nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Metode untuk menilai *discriminant validity* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *average variance extracted* ( $\sqrt{AVE}$ ) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model (*latent variable correlations*). Output untuk menilai *discriminant validity* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. AVE dan Akar AVE**

	AVE	$\sqrt{AVE}$	Keterangan
AKIP	0.462758	0.680263	Valid
KAP	0.418111	0.646615	Valid
KPP	0.541049	0.73556	Valid
OPK	1	1	Valid
PAK	0.544696	0.738035	Valid
PTI	0.423017	0.650398	Valid

Sumber : Output SmartPLS (2014)

**Tabel 2. Latent Variable Corelation**

	AKIP	KAP	KPP	OPK	PAK	PTI
AKIP	1					
KAP	0.878	1				
KPP	0.665	0.581	1			
OPK	-0.01	-0.07	-0.06	1		
PAK	0.730	0.827	0.655	-0.134	1	
PTI	0.699	0.767	0.531	-0.098	0.711	1

Sumber : Output SmartPLS (2014)

### Composite Reliability

Konstruk dinyatakan *reliable* jika nilai *composite reliability* diatas 0.70. Berikut hasil output untuk *composite reliability*

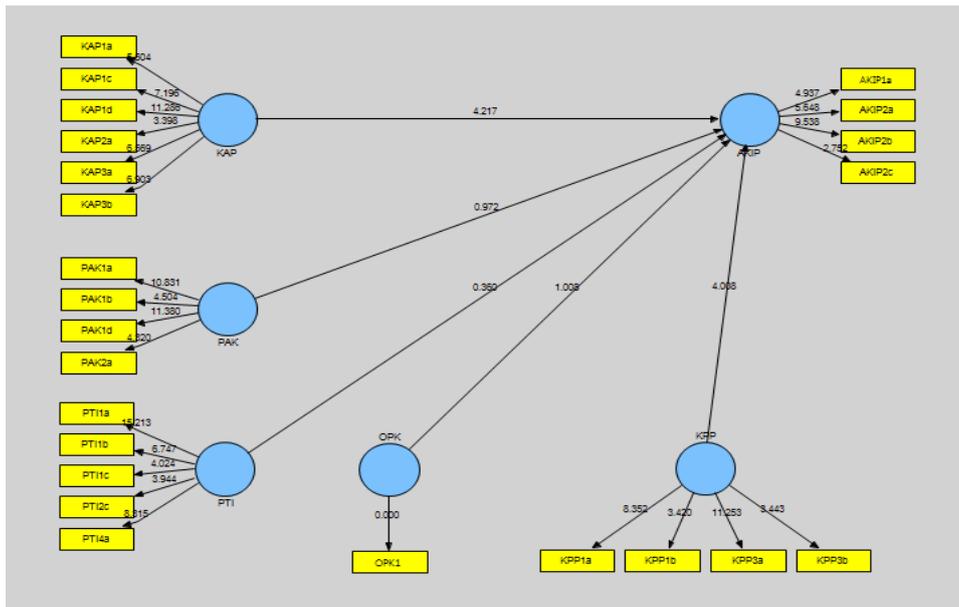
**Tabel 3. Composite Reliability**

	Composite Reliability	Keterangan
AKIP	0.771649	Reliabel
KAP	0.809936	Reliabel
KPP	0.824472	Reliabel
OPK	1	Reliabel
PAK	0.826975	Reliabel
PTI	0.780592	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS (2014)

### Hasil Pengujian Hipotesis (Inner Model)

Pengujian hipotesis dalam PLS disebut dengan pengujian model struktural (*structural model*) atau *inner model*. Untuk mendapatkan hasil estimasi koefisien parameter *path* dan tingkat signifikannya, maka model yang telah memenuhi kriteria *discriminant validity* dilakukan eksekusi kembali dengan memilih *Bootstrapping*. Berikut ini adalah model yang telah di *Bootstrapping*:



Gambar 4 Full Model Structural (PLS Bootstrapping)

Sumber : Output SmartPLS (2014)

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square ( $R^2$ ) yang merupakan uji *goodness-fit model*.

Tabel 4. R-Square

	R Square
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	0.816089
Kompetensi Aparatur Pemerintah (KAP)	
Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP)	
Otoritas Pengambilan Keputusan (OPK)	
Penerapan Akuntabilitas Keuangan (PAK)	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	

Sumber : Output SmartPLS (2014)

Tabel 4 ini menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0.816089 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 81.60%. Ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh variabel kompetensi aparatur pemerintah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan TI, otoritas pengambilan keputusan dan ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 81.89% dan masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Uji yang kedua adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Pengujian ini juga akan menunjukkan apakah hipotesis yang di ajukan dapat diterima atau ditolak. Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan adalah signifikan 5% (0.05) atau  $\pm 1.96$  (t table), jadi jika nilai t statistik kurang dari 1.96 maka hipotesis ditolak atau dengan kata lain menerima Hipotesis nol ( $H_0$ ) dan jika nilai t statistic lebih dari 1,96 maka hipotesis diterima atau dengan kata lain menerima Hipotesis satu ( $H_1$ ).

Tabel 5. Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR)
KAP	0.811	0.805	0.192	0.192	4.217
KPP	0.266	0.253	0.066	0.066	4.008
OPK	0.043	0.037	0.042	0.042	1.00
PAK	-0.137	-0.108	0.141	0.141	0.971
PTI	0.037	0.028	0.103	0.103	0.359

Sumber : Output SmartPLS (2014)

**Tabel 6. Result For Inner Weight**

Hipotesis	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistic	T table	Kesimpulan
KAP -> AKIP	0.805	0.1925	4.217	1.96	Diterima
KPP -> AKIP	0.253	0.0665	4.008	1.96	Diterima
OPK -> AKIP	0.037	0.0429	1.008	1.96	Ditolak
PAK -> AKIP	-0.108	0.1411	0.971	1.96	Ditolak
PTI -> AKIP	0.028	0.1032	0.359	1.96	Ditolak

Sumber : Output SmartPLS (2014)

## Pembahasan

### *Hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>)*

Hasil uji terhadap Koefisien parameter antara Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan adanya pengaruh positif sebesar 0.811869 dengan nilai t-statistic sebesar 4.217413 dan signifikan pada 0.05. Nilai t-statistik tersebut berada di atas t-table 1.96, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Dalam teori yang diperkenalkan McClelland dalam Oktindra (2010) mendefinisikan, Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksi, kinerja yang sangat baik. Sebuah akuntabilitas merupakan output dari suatu kinerja, maka dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki seseorang akan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas baik langsung ataupun tidak langsung.

### *Hipotesis Kedua (H<sub>2</sub>)*

Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) menyatakan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Jika dilihat dari tabel 5 dan tabel 6 terlihat nilai koefisien parameter hubungan langsung antara Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah sebesar -0.137128 dan t-statistik lebih rendah

daripada t table (0.971807 < 1,96). Berdasarkan hasil tersebut hipotesis kedua ditolak atau Penerapan Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak ditentukan oleh penerapan akuntabilitas keuangan, tetapi ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi penerapan akuntabilitas keuangan maka semakin rendah Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh banyak pihak mengartikan akuntabilitas kinerja hanya terbatas pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja. Akibatnya, suatu penyelenggaraan pemerintahan yang telah melaporkan alokasi dana yang digunakan dianggap sudah selesai mempertanggungjawabkan kegiatannya secara memadai terlepas dari apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat atau tidak, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### *Hipotesis Ketiga (H<sub>3</sub>)*

Hasil uji terhadap Koefisien parameter antara Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan adanya pengaruh positif sebesar 0.037158. dengan nilai t-statistic sebesar 0.359999. Nilai t-statistik tersebut berada di bawah t-table 1.96, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

Secara umum pemanfaatan TI oleh instansi pemerintah relatif kurang optimal dan belum menunjukkan arah pembentukan *e-Government* yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol antara lain adalah pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut mungkin belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif dan belum

mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan TI pada masing-masing SKPD.

#### ***Hipotesis Keempat (H<sub>4</sub>)***

Hasil uji terhadap Koefisien parameter antara Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan adanya pengaruh positif sebesar 0.043352. dengan nilai t-statistic sebesar 1.00841. Nilai t-statistik tersebut berada di bawah t-table 1.96, dengan demikian hipotesis keempat ditolak.

Tidak terbuktinya pengaruh positif otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa otoritas pengambilan keputusan yang selama ini sudah dimiliki oleh aparat pmda belum mampu mendorong aparat pmda agar lebih sering menggunakan informasi kinerja untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas kinerja) dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

#### ***Hipotesis Kelima (H<sub>5</sub>)***

Hasil uji terhadap Koefisien parameter antara Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan adanya pengaruh positif sebesar 0.266555 dengan nilai t-statistic sebesar 4.008191. Nilai t-statistik tersebut berada di atas t-table 1.96, dengan demikian hipotesis Kelima diterima.

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, dikatakan bahwa pelaksanaan AKIP harus berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kompetensi aparatur pemerintah (KAP) memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
2. Penerapan akuntabilitas keuangan (PAK) memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
3. Pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
4. Otoritas pengambilan keputusan (OPK) memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
5. Ketaatan pada peraturan perundangan (KPP) memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

### **Saran**

1. Objek penelitian sebaiknya dapat diperluas, misalnya SKPD se-provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang jelas.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang dapat diduga juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999  
*Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Hara, Hasibuan. 2010. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi*

- Informasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, studi pada SKPD Kota Pekanbaru.* Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik.* Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Oktiandra S. 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).* Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Prayitno, Tim Peneliti BKN. 2003. *Pedoman penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.* Puslitbang BKN, Jakarta.
- Rozi, M.R, 2010. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).* Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Silvia, S. 2013. *Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Jurnal. Universitas Negeri Padang.
- Soleman, Rusman. 2007. *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).* Disertasi, Unpad.
- TAP MPR No. III/MPR/2000 *tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.*
- TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*
- UU No 28/1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*
- Wijana, Nyoman. 2007. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kinerja Individual pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan.* Jurnal. Universitas Udayana, Bali.